

TINJAUAN HUKUM PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI

MEIDYA ANUGRAH / D 101 07 388

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam melaksanakan kegiatannya Koperasi berdasarkan prinsip Koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan cirri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya, sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong royong.

Kata Kunci : Badan Hukum Koperasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam melaksanakan kegiatannya Koperasi berdasarkan prinsip Koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan cirri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.¹ Sejak pertama kali diperkenalkan pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi.

Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya, sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotongroyong.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk efektifitas dan

¹International Co – operative Alliance, *Jatidiri Koperasi ICA Co-operative Identity Statement Prinsip – Prinsip Koperasi untuk Abad ke 21*, Terjemahan – Pengantar Ibnoe Soedjono Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia, Jakarta, 2001 hal 24-47

efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi kepada masyarakat dengan melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat yang secara teknis bertanggung jawab dalam bidang Perkoperasian ditingkat Propinsi / Daerah Istimewa dan Kabupaten / Kota, dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten / Kota. Dengan adanya Keputusan Menteri tersebut tugas pembantuan tersebut ada yang didelegasikan kepada Dinas / Kantor teknis sesuai tugas pokok dan fungsi, namun ada beberapa daerah yang disahkan sendiri oleh Gubernur / Bupati/ Walikota.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.² Akta otentik juga memuat keterangan seorang pejabat tentang apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.³

Dalam Pasal 1868 KUHPdata menyebutkan bahwa : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak berserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Menurut Sudikno Mertokusumo : Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti, sampai berapa jauhkan akta mempunyai kekuatan pembuktian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dibawah ini, untuk meninjau lebih jauh hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pembentukan badan hukum koperasi ?
2. Bagaimanakah perolehan status badan hukum koperasi ?

I. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembentukan Badan Hukum Koperasi

Orang-orang yang akan mendirikan Koperasi harus mengerti maksud dan tujuan Koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01 / Per / M.KUKM / I / 2006 adalah sebagai berikut :

- a. orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota Koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama ;
- b. pendiri Koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. pendiri Koperasi sekunder adalah pengurus Koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi sekunder;
- d. usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
- e. modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan
- f. mengelola Koperasi.
- g. usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi;

memiliki tenaga terampil dan mampu untuk Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 119

³*ibid*, hal 119

01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Rapat pembentukan Koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, untuk Koperasi Sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum, yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi yang bersangkutan.
2. Rapat pembentukan Koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.
3. Rapat Pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi dihadiri oleh Pejabat Dinas / Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Provinsi
 - c. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten / Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas / Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten / Kota.
4. Dalam rapat pembentukan tersebut dibahas antara lain mengenai pokok-pokokmateri muatan anggaran dasar Koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.
5. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan , jenis Koperasi , maksud dan tujuan, jenis Koperasi, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus , pengawas , pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.

Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkopersian, menyebutkan bahwa pembentukan Koperasi harus dilakukan dengan akta pendirian yang

memuat Anggaran Dasar. Anggaran dasar adalah aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan Koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri Koperasi pada saat rapat pembentukan Koperasi.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya :

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai permodalan
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- j. Ketentuan mengenai sanksi.
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- l. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- m. Ketentuan mengenai sanksi.

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang perkopersian tidak mengharuskan Anggaran Dasar Koperasi harus dibuat secara otentik , hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis , sehingga bisa dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik. Koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis memerlukan adanya kepastian hukum terutama menyangkut dokumen hukum berupa akta-akta dilingkungan Koperasi yang masih berstatus akta di bawah tangan. Akibatnya akta-akta yang dibuat oleh Koperasi kurang dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat terhadap pihak ketiga yang ingin berbisnis dengan Koperasi.

Pejabat umum bukanlah Pegawai Negeri Sipil tetapi mereka itu orang-orang swasta yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatannya dan selanjutnya mereka bebas dalam menjalankan profesinya. Mereka boleh memilih sendiri tempat di mana mereka akan bekerja .

Di dalam perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yang termasuk sebagai pejabat umum adalah :

1. Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Pegawai Catatan sipil berdasarkan Pasal 4 KUHPerdara
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Masing-masing pejabat umum tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 menyebutkan bahwa : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa akta-akta otentik harus dibuat oleh Notaris : ⁴

- a. bila dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan
- b. bila oleh peraturan undang-undang diatur harus dinyatakan dalam akta otentik.

Dengan demikian jika tidak diatur suatu perundang-undangan, perjanjian, keputusan atau ketentuan untuk dibuat dengan akta otentik maka orang yang melakukan perjanjian bebas untuk memilih memakai akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta, hal tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan dibutuhkan pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan Notaris tersebut. Dalam lalu-lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat, maka diperjelaskan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat

dan terpenuhi mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi, dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.

Pejabat yang berwenang, memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap. Bila permintaan ulang disetujui maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri secara tertulis, apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya secara tertulis. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir. Apabila pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akta pendirian Koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat

⁴R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 48

yang berwenang mengesahkan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

B. Perolehan Status Badan Hukum Koperasi

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Demikian juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan . Dalam penjelasan pasal 3 tersebut di atas dengan status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun keluar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat ke luar artinya , semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggungjawab Koperasi.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.⁵ Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu Koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian *obligatoir*, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya.⁶ Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang

mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.⁷

Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang . Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.⁹

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dengan telah disahkannya Akta Pendirian Koperasi Simpan pinjam dan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Usaha Simpan Pinjam maka pengesahan tersebut berlaku sebagai izin usaha. Yang dimaksud dengan pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha menurut penjelasan Pasal 3 ayat (3) tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian

Koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Ketentuan tersebut juga diatur dalam petunjuk teknis yaitu Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa pengesahan pendirian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi berlaku sebagai izin usaha, sehingga Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam Koperasi langsung dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Perlu juga untuk dirujuk, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

⁵H.Budi Untung ,*op.cit*, hal 31

⁶*Ibid*, hal 31

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)* , Liberty ,Yogyakarta ,1986,hal 53

⁸*ibid*, hal 53

⁹*ibid*, hal 53

Koperasi, permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris diajukan dengan melampirkan :

1. 1 (satu) salinan akta pendirian Koperasi bermeterai cukup ;
2. data akta pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
4. rencana kegiatan usaha Koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
5. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil, Menengah Nomor : 19/KEP/M/II/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi bahwa persyaratan untuk menjadi Pengurus maupun Pengawas tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus lain dan pengawas. Untuk lampiran surat pernyataan tidak boleh membuka Kantor Cabang , Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebelum melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. , ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998, bahwa untuk mendapatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota , baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman KSP dan USP melalui koperasinya dapat mendirikan jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang , Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Pendirian jaringan pelayanan baru dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP melalui Koperasi yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Lebih lanjut dalam hal Penelitian atau Verifikasi Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris, setelah surat permohonan beserta lampiran masuk di Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setelah diagendakan oleh Sub Bagian Umum dan

didisposisi oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di teruskan di Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan, yang kemudian oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan didisposisikan kepada staf yang menangani untuk diteliti atau verifikasi terhadap lampiran dan materi anggaran dasar yang akan disahkan.

Penelitian atau verifikasi tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan. Penelitian atau verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap materi anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris , dalam hal penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar Koperasi diperbolehkan sepanjang mengenai materi, dan bila ada perbaikan atau perubahan maka akan dibuatkan akta perbaikan atau akta perubahan. Untuk menghindari koreksi maka Notaris tersebut melakukan Koordinasi dengan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebelum akta ditandatangani maka draft akta pendirian Koperasi dikirim terlebih dahulu ke Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk diteliti.

Selain penelitian berkas-berkas juga dilakukan pengecekan lapangan di Koperasi untuk mengetahui domisili / alamat , kepengurusan , usaha yang akan dijalankan dan keanggotaan Koperasi. Pengecekan ke Koperasi dilakukan oleh Tim dari Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri dari : Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Sub Dinas Pelayanan Usaha Koperasi dan Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan.

Bila dari hasil penelitian dan pengecekan Koperasi layak untuk disahkan maka, akan dikeluarkan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah dengan jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Dengan disahkannya akta pendirian Koperasi maka Koperasi memperoleh status badan hukum Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Surat Keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi akan diserahkan ke Pengurus Koperasi dan Notaris yang membuat akta akan memperoleh tembusan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 bahwa pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bila domisili anggota Koperasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten / Kota dalam satu wilayah. Akta pendirian Koperasi yang diminta pengesahan dalam bentuk tertulis sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, namun tidak ada ketentuan untuk dibuat dengan akta otentik. Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, masyarakat yang akan mendirikan Koperasi sudah minta bantuan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi untuk membuat akta.
2. Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi tugasnya hanya membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses

pembentukan Koperasi dan akta pendirian Koperasi tersebut dapat diverifikasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

B. Saran

1. Perlu untuk diadakannya Sosialisasi tentang perkoperasian, proses pendirian dan persyaratan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditingkat provinsi/Kabupaten Kota, agar masyarakat yang akan mendirikan Koperasi mengetahui perkoperasian, syarat dan tatacara pendirian Koperasi sehingga Koperasi yang mengajukan pengesahan akta pendirian Koperasi tidak ditolak pengesahannya dikarenakan ketidaktahuan tentang perkoperasian.
2. Agar ada kepastian dan perlindungan hukum maka Akta Pendirian Koperasi untuk dibuat oleh Notaris maka tugas dan kedudukan Notaris dalam pembuatan akta Koperasi untuk dikuatkan atau dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang perkoperasian.
3. Dalam rangka untuk mengotimalkan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan Koperasi agar Notaris sebagai pembuat akta Koperasi untuk lebih mendalami pengetahuan tentang perkoperasian dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Modul Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah* Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan, 1996/1997 *Petunjuk Teknis Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam*.
- International Co-operative Alliance , *Jatidiri Koperasi ICA* CO-operative Identity Statement Prinsip-Prinsip Koperasi Abad ke -21, Terjemahan – Pengantar Ibnu Soedjono, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).
- R Soegondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia* , Liberty , Yogyakarta.
-, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- H. Budi Untung, . 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Yogyakarta.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang *Perkoperasian*
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*
- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Biro Hukum dan Organisasi, 1996
- Himpunan Peraturan Dibidang Perkoperasian dan Usaha Kecil tahun 1996*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01 /Per / M.KUKM/I/2006 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.
- Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*
- Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang *Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 91/Krp/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

BIODATA

MEIDYA ANUGRAH, Lahir di, Alamat
Rumah Jalan, Nomor Telepon +62.....,
Alamat Email

